BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep

1. Administrasi Publik

Administrasi merupakan kegiatan dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu melalui suatu kerjasama di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan yang telah ditentukan sebelumnya akan semakin mudah dalam merealisasikannya.

Menurut Nawawi (2003:34) administrasi adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan”.

Pada dasarnya administrasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam mengendalikan usaha kerjasamanya. Kerja sama yang baik akan mampu mengantarkan pada hasil yang maksimal pula. Sebaliknya, tanpa kerjasama yang baik, maka tujuan akan semakin sulit untuk direalisasikan.

Selanjutnya Atmosudirdjo (1982:21) mengartikan administrasi sebagai “pekerjaan ketatausahaan dana kesekretariatan yakni pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan tulis-menulis, misalnya surat-menyurat, kepegawaian, dokumentasi, dan kearsipan”.

Pernyataan di atas menggambarkan administrasi secara sempit. Sebagaimana yang banyak dipahami oleh sebagian

masyarakat bahwa administrasi hanya berbicara seputar surat menyurat saja, padahal administrasi sangat luas cakupannya.

Selanjutnya Soedjadi (1997:18) mengatakan bahwa administrasi adalah:

> "Suatu proses melakukan pengurusan dan pelaksanaan suatu kegiatan dengan menggunakan sumber daya secara tepat guna dan berdaya guna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan".

Awal perkembangannya kajian administrasi publik sangat erat kaitannya dengan Negara bahkan administrasi publik diidentikkan pula dengan brokrasi, sebagaimana dikatakan Henry (2004:55) bahwa

> *For the letter part of the twentieth century, the public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the major determinant of where this country is going. (Dalam tulisannya itu Henry menggunakan istilah birokrasi publik untuk menyebut administrasi publik)*.

Perkembangan masyarakat sebagai akibat dan adanya globalisasi memaksa semua pihak, terutama birokrasi pemerintah melakukan revisi, perbaikan dan mencari alternatif baru tentang sistem administrasi yang lebih cocok dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman. Administrasi publik sebenarnya sudah ada sejak dulu, yakni sejak masyarakat mulai dapat mengorganisasikan diri dan kelompoknya dalam bentuk sistem penataan pemerintahan.

Administrasi publik modern yang dikenal sekarang merupakan produk dari suatu masyarakat feudal yang tumbuh subur dinegara-negara Eropa. Negara-negara di daratan Eropa yang semuanya dikuasai oleh kaum feudal, bangsawan, kaum ningrat kerajaan berusaha untuk mengokohkan sistem pemerintahannya. Seiring

dengan makin berkembangnya masyarakat, sentralisasi kekuasaan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan monarki menimbulkan kebutuhan untuk mendapatkan korps administrator yang cakap, penuh dedikasi, stabil dan memiliki integrasi.

Perkembangan administrasi publik baru tidak dapat dilepaskan dari perkembangan berbagai paradigma dalam ilmu administrasi publik. Paradigma dapat diartikan sebagai perspektif yang dimiliki oleh komunitas keilmuan, yang terbentuk dari keinginan dan komitmen (konseptual, teoritis, metodologi, instrumental). Sebuah *paradigm* menuntun *scientific community* untuk melakukan seleksi terhadap sebuah masalah, evaluasi data, dan menganjurkan teori.

Menurut Rusdi (2010:95) secara konseptual proses perumusan kebijakan adalah digambarkan sebagai suatu proses yang linear, mulai dari tahap formulasi hingga pada penetapan usulan kebijakan yang akan ditetapkan oleh otoritas kebijakan. Proses inilah yang menetukan proses selanjutya yang dapat saja mencerminkan kehendak publik atau pun tidak relevan dengan apa yang menjadi preferensi mereka.

Perkembangan administrasi publik baru tidak dapat dilepaskan dari perkembangan berbagai paradigma dalam ilmu administrasi publik. Paradigma dapat diartikan sebagai perspektif yang dimiliki oleh komunitas keilmuan, yang terbentuk dari keinginan dan komitmen (konseptual, teoritis, metodologi, instrumental). Sebuah paradigm menuntun *scientific community* untuk melakukan seleksi terhadap sebuah masalah, evaluasi data, dan menganjurkan teori.

Herbert A. Simon (1993:3) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan Bersama. Kemudian lebih lanjut Dimock dan Dimock (1992:20) mengatakan bahwa administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen.

Menurut Denhardt (2002:28-29) pelayanan publik juga mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration* ke *New Public Management* dan terakhir ke *New Public Service*.

Administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Chandler dan Plano; dalam Keban, 2008:3).

Menurut keduanya administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama dibidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Selain itu administrasi publik juga dipahami sebagai studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak berdasarkan peran dan jabatan resmi dalam melaksanakan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan (Kasim, 1993:22).

Definisi tersebut secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Administrasi publik merupakan salah satu aspek kegiatan pemerintahan. Menurut Kasim (1993:21), terdapat dua aspek kunci dalam administrasi publik, yakni : (1) perubahan dan transformasi administrasi publik, dan (2) reformasi administrasi publik.

2. Manajemen

Ilmu manajemen sama usianya dengan kehidupan manusia. Manusia sebagai makluk sosial ada kecenderungan untuk berorganisasi dan bekerja sama. Dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah anggota suatu organisasi, misalnya organisasi agama, olah raga, seni, usaha dan orgnaisasi lainnya.

Manajemen merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan. Manajemen memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemimpin, sebab pemimpin yang sebenarnya ialah yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang lain lebih dihargai, sehingga mereka melakukan yang kita inginkan.

Menurut Parker (Handoko, 2000:8), ‘manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain’.

Defenisi ini mengandung arti bahwa dalam mencapai suatu tujuaan para manajer akan memanfaatkan orang lain. Untuk dapat memastikan orang yang kita pimpin mau melaksanakan apa yang kita kehendaki, diperlukan cara untuk mengurus dan mengaturnya dengan

baik. Dalam mengurus orang-orang pada organisasi, ada beberapa proses aktivitas yang harus dilakukan.

Robbins dan Coultar (Wibowo, 2011:2) menyatakan:

> Manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input dan output dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui fungsi-fungsi *Planning, Organizing, Actuating*, dan *Controlling*.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu unsur yang penting pada manajemen karena merupakan tempat lahirnya kebijakan menyangkut arah organisasi termasuk di dalamnya anggota-anggotanya. Selain itu manajemen juga mengatur mengenai pengendalian sumber daya organisasi sehingga didapatkan organisasi yang solid.

Manajemen merupakan kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan. Manajemen memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemimpin, sebab pemimpin yang sebenarnya ialah yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan orang lain lebih dihargai, sehingga mereka melakukan yang kita inginkan.

Daft (Wibowo, 2016:2) mendefinisikan ‘Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional dengan cara efektif dan efisien

melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi sumber daya organisasional.'

Berdasrkan pengertian tersebut menekankan bahwa pentingnya manajer/pemimpin melaksankan fungsi-fungsi manajemen secara baik dalam penggunaan/pemanfaatan sumber-sumber daya organisasional mulai dari tahap perencanaan (*planning*) sampai kepada tahap pengawasan (*controlling*) agar dapat mencapai tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Keberadaan manajemen pada organisasi menjadi sangat penting, karena tanpa adanya manajemen tidak akan ada tujuan organisasi yang dapat tercapai. Olehnya itu untuk mencapai tujuan organisasi, sangat ditentukan oleh kemampuan individu yang mengendalikan manajemen atau juga disebut manajer. Tugas dari manajer ialah menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan yang mengefektifkan proses dengan memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya di organisasi. Proses tersebut berupa perencanaan hingga menjalankan apa yang telah direncanakan.

Griffin (Fahmi, 2011:2), menyebutkan bahwa:

> Manajemen merupakan suatu rangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Organisasi membutuhkan peranan seorang pimpinan oleh karena pemimpin memiliki pengaruh sangat signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu seorang pemimpin harus memiliki

kompetensi atau kemampuan manajerial yang lebih, mempunyai perilaku yang baik, mampu mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, berani mengambil keputusan, mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, bijaksana, menjadi pengayom, dan senantiasa memberikan motivasi kepada bawahannya.

Kepemimpinan juga merupakan salah satu unsur yang penting pada manajemen karena merupakan tempat lahirnya kebijakan menyangkut arah organisasi termasuk di dalamnya anggota-anggotanya. Selain itu manajemen juga mengatur mengenai pengendalian sumber daya organisasi sehingga didapatkan organisasi yang solid.

Manajemen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses integral kepemimpinan. Sesungguhnya, dapatlah dikatakan bahwa manajemen tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan, dan sebaliknya. Dalam kaitan ini, berbicara tentang manajemen berarti berbicara tentang kepemimpinan, karena pada saat pemimpin melaksanakan upaya memimpin, pada dasarnya ia melaksanakan fungsi dari manajemen itu sendiri.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Stoner dan Wankel (Siswanto, 2003:22), tentang manajemen, yaitu:

> Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan upaya pengendalian anggota organisasi dan penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan organisasi yang solid maka dibutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan semua kepentingan-kepentingan

yang ada pada anggota-anggotanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap anggota memilki kepentingan yang berbeda dengan anggota yang lainnya. Peran pimpinan diharapkan mampu menyatukan semua kepentingan-kepentingan sumber daya manusia menjadi suatu persepsi atau misi bersama guna mencapai visi organisasi.

Manajemen dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Manajemen keuangan desa yang baik akan menghasilkan pembangunan desa yang lebih terarah, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

3. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan serta program pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Konsep ini mencakup berbagai prinsip dan pendekatan dalam mengelola sumber daya negara, baik yang bersifat manusia, keuangan, maupun teknologi, guna melayani masyarakat secara optimal.

Manajemen pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa karena menentukan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa. Dengan manajemen pemerintahan yang baik, dana desa dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah penyimpangan dalam penggunaannya.

Manajemen pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah yang secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam negara dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan pengendalian. Masih menurut Suryadinata bahwa tujuan manajemen pemerintahan adalah mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara (Rachmat, 2018:62).

Menurut Suradinata (2005) pemerintah adalah lembaga atau badan-badan yang menyelenggarakan tugas-tugas atau kegiatan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintahan adalah suatu proses yang dinamis sedangkan pemerntah merupakan sesuatu yang statis. Suraditama menjelaskan “pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh kegiatan pengurusan negara oleh semua lembaga pemegang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dalam lingkup wilayah negara. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan adalah pelaksanaan pengurusan negara yang dilakukan oleh eksekutif.

Selanjutnya Suryaditama (2007) mengemukakan bahwa pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah yang dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kepentingan rakyat wiraswasta.

Sementara itu dalam prinsip-prinsip manajemen selalu menempatkan kegiatan planning atau perencanaan menjadi kegiatan awal dalam suatu tahapan kegiatan. Terry (1977) mengistilahkannya dengan POAC, yang merupakan singkatan dari *Planning*, *Organizing, Actuating*, dan *Controlling*.

1) *Planning* atau perencanaan adalah kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut. Alokasi sumberdaya yang amat terbatas, merupakan prinsip dan landasan dasar dalam merumuskan perencanaan dan pegorganisasian. Dalam menyusun perencanaan harus ditentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang akan melakukan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam suatu perencanaan tersebut harus dipertimbangkan dari segi-segi teknis, ekonomis, sosial dan pelayanan yang diberikan organisai. Jadi, perencanaan sebagai penghubung status sekarang dengan sasaran yang ingin dicapai itu menjadi ukuran perbandingan bagi setiap pemimpin, dalam penentuan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan anggota dalam organisai. Dalam suatu perncanaan yang jelas akan memudahkan setiap anggota organisasi menjalankan kegiatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal dan positif terhadap organisasi.

2) *Organizing* atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi. Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin hubungan antar semua aktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatn semua sumberdaya, melalui struktur formal dengan kewenangan masing- masing.

3) *Actuating* atau penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Dalam penggerakan *(actuating)* dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerjasama dari seluruh lini, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien.

4) *Controlling* atau pengawasan, merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan agar para anggota organisai dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilak ukan untuk mengukur hasil pekerjaan, guna menghindari

penyimpangan- penyimpangan, dan jika diperlukan segera melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

4. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan keuangan desa mengacu pada sejauh mana penggunaan dana desa. Hal tersebut agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mahmudi (2016) mendefinisikan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa, sebagai kemampuan pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif merupakan elemen krusial dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Keuangan desa harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi lokal, pemerataan pembangunan, serta stabilitas sosial di tingkat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif memungkinkan desa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya, jalan, irigasi, sarana kesehatan, dan pendidikan.

Menurut studi oleh Halim (2014), desa yang menerapkan pengelolaan keuangan berbasis prinsip *value for money* mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan.

Dana desa yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan sektor ekonomi lokal. Salah satunya melalui program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan penelitian Sedarmayanti (2017), desa yang mengalokasikan anggaran untuk sektor produktif memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi dibanding desa yang hanya fokus pada pembangunan fisik.

Menurut Mahmudi (2016), sistem pengelolaan keuangan desa yang berbasis transparansi dan akuntabilitas dapat menekan angka korupsi di tingkat desa. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait, risiko penyalahgunaan dana desa dapat dikurangi, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan desa yang efektif berperan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, transparansi pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi

masyarakat menjadi faktor utama dalam mencapai efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Efektivitas pengelolaan keuangan desa dapat meliputi penggunaan dana desa untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran. Selanjutnya, target pembangunan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Efektivitas pengelolaan keuangan desa bergantung pada beberapa faktor utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, efisiensi penggunaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik, dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Implementasi Sistem Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa indikator Pengelolaan Keuangan Desa ialah sebagai berikut:

a. Perencanaan

1) Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPdesa tahun berkenaan.
2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3) Rancangan Peraturann Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

b. Pelaksanaan

1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksankan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
2) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverivikasi oleh Sekertaris Desa.
3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

c. Penatausahaan

1) Bendahara Desa melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan penerimaan dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
2) Bendahara Desa mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1) Sekertaris Desa menyusun laporan semester pertama dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan.
2) Sekertaris Desa menyusun laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

1) Sekertaris Desa menyusun laporan pertanggungjawaban.
2) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir rahun melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan ke masyarakat. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

6. *Good Governance*

Good governance pada dasarnya suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia.

Salah satu lembaga tersebut yaitu *United Nations Development Program* (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for sustainable human development*" (1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan *society* (Dwiyanto, 2005:82).

Sementara Menurut Sedarmayanti (2003:5) terdapat tiga model tata kepemerintahan yang baik, sebagai berikut :

1) *Politcal Governance* yang mengacu pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*policy/strategy formulation*).
2) *Economic Governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap *equity* (kekayaan), *proverty* (properti), serta *quality of life* (kualitas hidup).
3) *Administrative Governance* yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Good governance menghendaki pemerintah dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, serta sumber daya pemerintah daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara. Penerapan *good governance* tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Good governance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor non Negara dalam suatu usaha kolektif (Ganie, 2000:142).

Good Governance Pada dasarnya lebih berfokus pada pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu Negara dengan tata kelola kepemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sejalan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Tujuan *good governance* adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Kurniawan, 2005:12).

Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai di suatu negara bila dilihat dari rakyatnya yang sejahtera dan makmur. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah karena banyaknya kendala-kendala yang melanda suatu negara untuk bisa mewujudkan tata kepemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya tujuan *good governance*, pemerintah maupun masyarakatnya sendiri harus bekerja sama untuk sadar dan menanamkan rasa peduli kepada Negara agar

terwujudnya kepemerintahan yang baik untuk selalu mematuhi peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

Untuk terwujudnya tata kepemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003:7) prinsip-prinsip *Good Governance* adalah sebagai berikut :

1) Partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.
2) Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya kepemerintahan yang baik.
3) Transparansi, dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.
4) Peduli pada stakeholder, yaitu lembaga – lembaga harus melayanai semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku.
5) Berorientasi pada konsensus, yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan-kepentingan atau bidang-bidang yang berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk sekelompok masyarakat terutama dalam kebijakan dan prosedur**.**
6) Kesetaraan, yaitu semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka sendiri.
7) Efektivitas dan efisien, yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola sumber-sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan.
8) Akuntabilitas, yaitu dapat terjadi di semua organisasi yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.

B. Penelitian Terdahulu

1. Nama Penulis : Dokman Marulitua Situmorang, Veneranda Rini Hapsari, dan Oktavia Marpaung

   Judul Publikasi : Analisis penggunaan sistem keuangan desa di daerah 3T

   Tahun Publikasi : 2021

   Metode Penelitian : Kualitatif dengan pendekatan studi kasus

   Hasil Penelitian : Desa dan panitia keuangan sangat berhati-hati dalam pelaporan dan pihak dari kantor pemerintah desa selalu melakukan monitoring dan evaluasi, transparansi penggunaan dana desa sudah mulai diterapkan di Kabupaten Bengkayang, kita bisa lihat publikasi penggunaan dana desa dengan spanduk. Faktor jarak dari pusat pemerintahan desa menjadi salah satu kendala, kurangnya keahlian dalam memberikan pelatihan kepada desa Kaur, faktor infrastruktur jalan yang buruk menjadi kendala utama dalam berkoordinasi dengan kantor pemerintah desa, dan ketersediaan sinyal telepon merupakan salah satu kendala.

   (https://ejournal.raharja.ac.id/index.php/jmari/article/view/1654/1009)

Kaitan dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan kajian pengelolaan dana sesa dengan lokasi yang jauih dari kota dan memiliki infrastruktur yang belum maksimal dalam menunjang pengelolaan dana kampung.

2. Nama Penulis : Uul Thybah, Lingga Yuliana, dan Didin Hikmah Perkasa

   Judul Publikasi : Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas

   Tahun Publikasi : 2024

   Metode Penelitian : Kualitatif deskriptif

   Hasil Penelitian : Desa Madat telah mengadopsi sistem manajemen keuangan desa yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

   (https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/mk/article/view/128)

   Kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pada proses rangkaian pengelolaan kampung secara keseluruhan.

3. Nama Penulis : Hijratul Aeni, Lukman Effendy, dan Nurabiah

   Judul Publikasi : Efektivitas penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa (studi

kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari)

Tahun Publikasi : 2022

Metode Penelitian : Kualitatif deskriptif

Hasil Penelitian : Penerapan siskeudes dilihat dari indikator kesesuaian informasi yang diminta dalam template/program, kesesuaian jenis laporan, ketepatan dan kepastian waktu pelaporan, kesesuaian persyaratan, prosedur, dan tahapan pelaporan, dan umpan balik (*feedback*) dapat dikatakan sudah efektif. Kemudian mengenai akuntabilitas laporan keuangan desa dilihat dari indikator akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal, bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa secara vertikal dan horizontal dapat dikatakan sudah baik atau sudah akuntabel, meskipun masih terdapat kendala yaitu berkaitan dengan kecukupan atau kelengkapan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Taman Sari.

(https://mail.online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/18494/14268)

Penelitian ini hanya menekankan pengelolaan keuangan kampung pada aspek akuntabilitas, namun penelitian ini menekankan selain pada aspek akuntabilitas, juga aspek transparansi.

4. Nama Penulis : Muhammad Dimas Rizqi dan Mardi Murahman
   Judul Publikasi : Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa
   Tahun Publikasi : 2023
   Metode Penelitian : Studi literatur
   Hasil Penelitian : Pemerintah telah memanfaatkan perkembangan IT untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabel, partisipatif, dan harus berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa, selain itu masyarakat juga dapat mengawasi baik dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya. Namun, beberapa hal yang dapat berpotensi menjadi kekurangan seperti SDM yang masih kurang memadai atau kurang berkompeten baik dari pegawainya sendiri,

masyarakatnya maupun stekholder yang terkait.

(https://mail.online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/18494/14268)

Penelitian ini menekankan secara keseluruhan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Sementara penelitian ini hanya menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas.

5. Nama Penulis : Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum

   Judul Publikasi : Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa

   Tahun Publikasi : 2019

   Metode Penelitian : Studi literatur

   Hasil Penelitian : Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai sinyalemen positif dalam pengelolaan desa khususnya keuangannya. Anggaran yang cukup besar sangat besar manfaatnya dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki desa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien. Apalagi peranan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri bekerjasama dalam membuat aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa

(Siskeudes) dalam mengelola anggaran desa sehingga akan membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam memhgelola keuangan desa secara efektif, efisien, serta transparansi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

(https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/2487/2274)

Penelitian ini lebih kompherensif karena melibatkan aplikasi melalui SISKEUDES dalam pengelolaan dana kampung dibandingkan dengan penelitian ini.

C. Defenisi Konsep

1. Sistem pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
2. Efektivitas implementasi Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) adalah penyelenggaraan sistem keuangan dana desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
3. Perencanaan adalah perencanaan penggunaan dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
4. Pelaksanaan adalah pelaksanaan program atas perencanaan penggunaan dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

5. Penatausahaan adalah penatausahaan atas penggunaan dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
6. Pelaporan dalah pelaporan penggunaan dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
7. Pertanggungjawaban adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
8. Faktor pendukung dan faktor penghambat adalah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
9. Koordinasi adalah pelaksanaan tugas sekretaris kampung selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Pemerintahan Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
10. Verifikasi adalah tugas lain dari sekretaris kampung selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
11. Komitmen pengelola adalah komitmen Kepala Urusan (Kaur) dan Kaur Keuangan selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK) Pemerintahan Kampung dalam menjalankan seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan kampung di Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

D. Kerangka Pikir Penelitian

